

**PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
FUNGSI PENDIDIKAN DAN FUNGSI KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015-2021**



Skripsi Oleh:

SOFIAH MAHARANI

01021181924001

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
FUNGSI PENDIDIKAN DAN FUNGSI KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015-2021

Disusun oleh:

Nama : Sofiah Maharani
Nim : 01021181924001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing



Tanggal: 24 Oktober 2023

Prof. Dr. Azwardi S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
FUNGSI PENDIDIKAN DAN FUNGSI KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015-2021**

Disusun oleh:

Nama : Sofiah Maharani
Nim : 01021181924001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 November 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

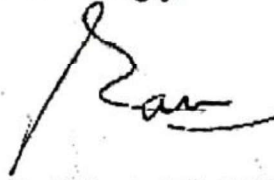
Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 10 November 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Dosen Penguji



Dr. Sukanto S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-11-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sofiah Maharani
Nim : 01021181924001
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Pengaruh Dana Desa dan Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2015-2021

Pembimbing:

Nama Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Azwardi S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 8 November 2023

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 10 November 2023
Pembuat Pernyataan



Sofiah Maharani
NIM. 01021181924001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-11-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul Pengaruh Dana Desa dan Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2015-2021. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dana desa, belanja fungsi pendidikan, dan belanja fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 16 November 2023

Sofiah Maharani
NIM. 01021181924001

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang ada. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan ilmu-ilmunya untuk dapat membimbing dan memberikan masukan selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembelajaran, pengetahuan, wawasan yang sangat bermanfaat dan berharga selama proses perkuliahan.
5. Seluruh keluarga besar terutama Orang Tua yaitu Ibu Yuliana dan Bapak Akhirudin serta saudaraku Mudriko Ahyulindo dan Maripaturullah, yang selalu memberikan semangat, dorongan dan dukungan serta doa yang tiada henti.

Indralaya, 16 November 2023

Sofiah Maharani
NIM. 01021181924001

ABSTRAK

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN FUNGSI PENDIDIKAN DAN FUNGSI KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2021

Oleh:

Sofiah Maharani; Azwardi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2015-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari tahun 2015-2021, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua. Belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Dana Desa, Belanja Daerah Fungsi Pendidikan, Belanja Daerah Fungsi Kesehatan, Kemiskinan

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Ketua



Prof. Dr. H. Azwardi S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

ABSTRACT

THE EFFECT OF VILLAGE FUNDS AND REGIONAL EXPENDITURES BASED ON EDUCATION AND HEALTH FUNCTIONS ON POVERTY IN DISTRICTS / CITIES OF PAPUA PROVINCE IN 2015-2021

By:

Sofiah Maharani; Azwardi

This study aims to analyze the effect of village funds, education function expenditures and health function expenditures on poverty in Papua Province districts/cities in 2015-2021. The data used in this study is secondary data in the form of panel data from 2015-2021, the sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The method in this study uses quantitative descriptive analysis. Analysis techniques in research use panel data regression analysis techniques. The results showed that village funds had a negative and significant effect on poverty in the districts / cities of Papua province. Education spending and health spending have no effect on poverty.

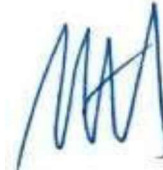
Keywords: Village Fund, Regional Expenditure for Education Function, Regional Expenditure for Health Function, Poverty

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Chairman



Prof. Dr. H. Azwardi S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Sofiah Maharani
	NIM	01021181924001
	Tempat, tanggal lahir	Lahat, 7 Agustus 2002
	Alamat	Desa Arahah, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat
	Handphone	081379350071
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi Badan	158 cm	
Berat Badan	50 kg	
Email	sofiah.maharani07@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2007-2013	SD Negeri 13 Merapi Timur	
2013-2016	SMP Negeri 1 Merapi Timur	
2016-2019	SMA Unggul Negeri 4 Lahat	
2019-2023	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Kemiskinan.....	12
2.1.2. Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan	16
2.1.3. Teori Transfer Antar Tingkat Pemerintah	19
2.1.4. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.5. Peran Pemerintah dalam Perekonomian	20
2.1.6. Teori Pengeluaran Pemerintah: <i>Expenditure Programs For The Poor</i> by Harvey S. Rosen	23

2.1.7. Dana Desa.....	23
2.1.8. Belanja Fungsi Pendidikan	24
2.1.9. Belanja fungsi Kesehatan	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Alur Pikir.....	31
2.4. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	34
3.2. Jenis dan Sumber Data	34
3.3. Metode Pengumpulan Data	34
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	35
3.5. Teknik Analisis.....	37
3.5.1. Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel	38
3.5.2. Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2015-2021	43
4.1.2. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2015-2021	47
4.1.3. Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2021	51
4.2. Hasil Penelitian.....	58
4.2.1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel	58
4.2.2. Pemilihan Model	59
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	61
4.2.4. Hasil Estimasi Model Terpilih	62
4.2.5. Uji Hipotesis.....	67
4.2. Pembahasan	70

4.2.1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan	70
4.2.2. Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	72
4.2.3. Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan Terhadap Kemiskinan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Provinsi Papua 2015-2021.....	2
Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam persentase).....	3
Tabel 1.3 Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam miliar rupiah)....	6
Tabel 1.4 Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam miliar rupiah).....	8
Tabel 1.5 Belanja Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam miliar rupiah)	9
Tabel 2.1 Garis Kemiskinan di Provinsi Papua.....	14
Tabel 4.1 Hasil <i>Common Effect Model</i> (CEM)	58
Tabel 4.2 Hasil <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	59
Tabel 4.3 Hasil <i>Random Effect Model</i> (REM)	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.7 Hasil Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	63
Tabel 4.8 Intersep Kabupaten/Kota Provinsi Papua.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	68
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Perangkap Kemiskinan.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Rata-Rata Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.	44
Gambar 4.2 Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2021	45
Gambar 4.3 Rata-Rata Dana Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Papua	49
Gambar 4.4 Rata-Rata Dana Desa Berdasarkan Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2021	51
Gambar 4.5 Rata-Rata Belanja Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua...	53
Gambar 4.6 Rata-Rata Belanja Pendidikan Berdasarkan Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2021	55
Gambar 4.7 Rata-Rata Belanja Kesehatan Berdasarkan Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2015-2021	56
Gambar 4.8 Rata-Rata Belanja Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua....	57
Gambar 4.9 Perkembangan Dana Desa dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Regresi.....	87
Lampiran 2. <i>Common Effect Model</i>	97
Lampiran 3. <i>Fixed Effect Model</i>	98
Lampiran 4. <i>Random Effect Model</i>	99
Lampiran 5. Uji Chow.....	100
Lampiran 6. Uji Hausman	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, proses pembangunan senantiasa menghadapi berbagai persoalan yang meliputinya. Persoalan dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu problematika yang akan dihadapi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunannya. Salah satu problematika dalam pembangunan ekonomi adalah permasalahan kemiskinan. Frisdiantara & Mukhklis (2018) menyebutkan salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah karena adanya lingkaran perangkap kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks hal ini karena kemiskinan bersifat multidimensi, terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang membebani setiap negara, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan, dan dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasinya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,71 persen atau sekitar 26,50 juta jiwa penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Jika dilihat pada tingkat Provinsi, terdapat 16 Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen. Kemudian jika dilihat berdasarkan

kawasan, hampir seluruh Kawasan Timur Indonesia memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen.

Salah satu wilayah di Timur Indonesia adalah Provinsi Papua. Provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman situs Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) BAPPENAS per September 2021, Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan yaitu sebesar 27,38 persen. Tingkat kemiskinan yang mencapai 27,38 persen ini menjadikan Papua sebagai Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2021 terdapat 872,08 ribu jiwa atau 35,71 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 48,36 ribu jiwa atau 4,91 persen

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Provinsi Papua 2015-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase (%)
2015	859,15	28,4
2016	911,33	28,4
2017	897,69	27,76
2018	917,63	27,43
2019	926,36	26,55
2020	911,37	26,68
2021	920,44	27,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan angka kemiskinan Provinsi Papua dari tahun 2015-2021 berfluktuatif. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, pada tahun 2015 di Provinsi Papua terdapat sebanyak 859 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu jumlah penduduk miskin menjadi 920 ribu

jiwa. Namun jika dilihat dari tingkat persentasenya, kemiskinan di Papua pada tahun 2015 sebesar 28,4 persen turun menjadi 27,38 persen pada tahun 2021. Dalam kurun waktu tujuh tahun, tingkat persentase kemiskinan di Papua mengalami penurunan sebesar 1,02 persen. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Papua.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam persentase)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Biak Numfor	25,5	24,57	24,45
Kab. Jayapura	13,13	12,44	12,13
Kab. Jayawijaya	38,33	37,22	37,09
Kab. Merauke	10,35	10,03	10,16
Kab. Mimika	14,54	14,26	14,17
Kab. Nabire	24,81	24,15	23,83
Kab. Paniai	37,16	36,71	36,59
Kab. Puncak Jaya	35,71	34,74	36
Kab. Kepulauan Yapen	27,13	26,3	26,09
Kota Jayapura	11,49	11,16	11,39
Kab. Sarmi	14,41	13,87	13,84
Kab. Keerom	16,83	16,32	16
Kab. Yahukimo	38,82	37,34	37,64
Kab. Pegunungan Bintang	30,51	30,15	30,46
Kab. Tolikara	32,9	32,04	32,6
Kab. Boven Digoel	19,66	19,41	19,9
Kab. Mappi	25,5	25,04	26,05
Kab. Asmat	26,6	25,49	24,83
Kab. Waropen	30,95	29,54	29,85
Kab. Supiori	38,79	36,91	37,91
Kab. Mamberamo Raya	29,13	28,38	28,78
Kab. Mamberamo Tengah	36,93	36,41	36,76
Kab. Yalimo	34,52	32,82	33,25
Kab. Lanny Jaya	39,52	38,13	38,73
Kab. Nduga	38,24	36,72	37,18
Kab. Dogiyai	31,12	28,62	28,81

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Puncak	38,24	36,96	36,26
Kab. Intan Jaya	42,92	40,71	41,66
Kab. Deiyai	43,65	41,76	40,59

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua memiliki angka yang lebih dari 10 persen. Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2021 menempati posisi pertama sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Papua yaitu sebesar 41,66 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk di kabupaten ini berada dalam kemiskinan. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten/kota yang lain yang ada di Provinsi Papua yaitu sebesar 10,16 persen. Meskipun demikian angka ini masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan campur tangan dari pemerintah menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memutus lingkaran perangkap kemiskinan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Fadly *et al.*, 2021). Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal yang berupa kebijakan mengenai Belanja (Girsang, 2011). Adanya anggaran belanja dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat miskin melalui kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah secara langsung seperti program bantuan tunai bersyarat atau tanpa syarat, ataupun secara tidak langsung melalui perluasan akses pendidikan dasar, infrastruktur dan perawatan kesehatan (Todaro & Smith,

2011). Kebijakan-kebijakan mengenai anggaran belanja untuk mengatasi masalah kemiskinan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah adanya belanja negara berupa transfer ke daerah yang salah satunya adalah dana desa. Dana desa yang dikeluarkan pemerintah ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Beberapa program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembangunan gedung PAUD, bantuan beasiswa, pengadaan air bersih, dan pembinaan posyandu.

Pemerintah Indonesia pertama kali memberikan dana desa pada tahun 2015 melalui amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sampai dengan tahun 2021 dana desa yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 jumlah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp20,7 triliun menjadi sebesar Rp72 triliun di tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bahwa Provinsi Papua pada tahun 2021 menjadi Provinsi dengan penerimaan dana desa terbesar setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan jumlah realisasi sebesar 5.429,73 miliar rupiah. Kawulur *et al.* (2019) menemukan

bahwa dengan adanya dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1.3 Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Biak Numfor	202,7	206,9	206,9
Kab. Jayapura	128,8	132,5	134,5
Kab. Jayawijaya	280,7	282	282
Kab. Merauke	220,5	226,1	235,4
Kab. Mimika	143,9	148,8	151,1
Kab. Nabire	90,7	94,3	97,7
Kab. Paniai	196	199,2	201,1
Kab. Puncak Jaya	280,5	290,8	290,8
Kab. Kepulauan Yapen	135,7	138,7	137,6
Kota Jayapura	25,8	26,4	27,5
Kab. Sarmi	99	106	110,8
Kab. Keerom	99,5	98,5	99,7
Kab. Yahukimo	405,9	409,1	409,1
Kab. Pegunungan Bintang	253,3	262,6	264,5
Kab. Tolikara	419,5	422,3	422,3
Kab. Boven Digoel	136,2	143,8	151,8
Kab. Mappi	180,9	188,4	193,4
Kab. Asmat	247	249,8	255,3
Kab. Waropen	103	104,2	105,1
Kab. Supiori	42,3	43,3	44,2
Kab. Mamberamo Raya	97,5	107,5	117,2
Kab. Mamberamo Tengah	88,6	94,1	98
Kab. Yalimo	243,3	246,6	246,6
Kab. Lanny Jaya	349,9	346,1	346,1
Kab. Nduga	214,3	216,5	216,5
Kab. Dogiyai	113,4	116,1	119,4
Kab. Puncak	205,1	213,4	219,7
Kab. Intan Jaya	136,3	142,5	149,2
Kab. Deiyai	92,9	93,7	96,3

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu), 2023

Tabel di atas merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan dari dana desa per Kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Terlihat dari tabel di atas rata-rata setiap tahunnya dana desa di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dana desa tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Yahukimo sebesar 409 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan jumlah dana desa yang cukup tinggi. Dengan adanya jumlah dana desa yang cukup besar ini dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Provinsi Papua.

Selanjutnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan perlu memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan memperhatikan belanja fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan (Todaro dan Smith, 2011). Hal ini karena pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Produktivitas yang rendah dapat mengakibatkan tingkat pendapatan menjadi rendah sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan (Damanhuri & Findi, 2014).

Adanya tingkat kesehatan serta pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Jacobus *et al.*, 2019). Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Papua disebabkan oleh tingkat pendidikan, tenaga medis, dan topografi wilayah (Tri Wahyuni dan Damayanti, 2014). Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dapat berupa memperbaiki kualitas pendidikan maupun kesehatan. Melati *et al.* (2021) menemukan bahwa di Jawa Barat belanja fungsi Pendidikan dan fungsi kesehatan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan.

Dengan demikian ketika terjadi peningkatan pada belanja fungsi pendidikan dan kesehatan maka akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan.

**Tabel 1.4 Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
(dalam miliar rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Biak Numfor	221,4	200,4	184,6
Kab. Jayapura	273,8	287,9	239,9
Kab. Jayawijaya	113,3	89	168,7
Kab. Merauke	423,1	442,8	301,2
Kab. Mimika	328,2	402,4	369,7
Kab. Nabire	178,6	175,6	211,1
Kab. Paniai	115,5	152,7	164,1
Kab. Puncak Jaya	76,2	64,2	80,4
Kab. Kepulauan Yapen	203,1	189	191,9
Kota Jayapura	314,7	291,3	316,5
Kab. Sarmi	111,3	114,8	128,2
Kab. Keerom	151,2	116,9	146,4
Kab. Yahukimo	209,8	165,5	192,3
Kab. Pegunungan Bintang	127,8	150,7	161,3
Kab. Tolikara	116,1	107,8	241,4
Kab. Boven Digoel	150,7	156,3	153,6
Kab. Mappi	226,7	245,2	205,9
Kab. Asmat	208,9	189,8	214
Kab. Waropen	64,4	69	106,9
Kab. Supiori	80,9	72,3	109,3
Kab. Mamberamo Raya	125,8	129,4	86,1
Kab. Mamberamo Tengah	61,1	70,7	82
Kab. Yalimo	96	118,2	97,9
Kab. Lanny Jaya	122	114,3	150,3
Kab. Nduga	141,2	122,2	76,5
Kab. Dogiyai	137,1	171,5	131,8
Kab. Puncak	77,6	60,2	75,5
Kab. Intan Jaya	99,6	82,5	113,4
Kab. Deiyai	84,5	99,9	125

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu), 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir belanja fungsi pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Kabupaten Mimika menjadi wilayah dengan pengeluaran terbesar pada fungsi pendidikan di tahun 2021 dengan jumlah sebesar 369 miliar rupiah. Sementara itu Kabupaten Puncak menjadi Provinsi dengan pengeluaran paling kecil pada fungsi pendidikan di tahun 2021 dengan jumlah sebesar 75 miliar rupiah.

**Tabel 1.5 Belanja Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
(dalam miliar rupiah)**

Kabupaten/kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Biak Numfor	311	311,6	283,6
Kab. Jayapura	166,1	191,6	215,9
Kab. Jayawijaya	186,2	134,6	225,9
Kab. Merauke	385,3	383,5	341
Kab. Mimika	364,7	408,2	582,2
Kab. Nabire	238,3	235,4	244,3
Kab. Paniai	168,2	205	247,2
Kab. Puncak Jaya	104,5	135,4	118,4
Kab. Kepulauan Yapen	151,6	190,8	186,7
Kota Jayapura	123,9	162,6	151,6
Kab. Sarmi	92,7	137,6	111,2
Kab. Keerom	145,3	107,1	102
Kab. Yahukimo	199,5	140,8	232,8
Kab. Pegunungan Bintang	207,5	275,9	184,2
Kab. Tolikara	143	191,8	133,6
Kab. Boven Digoel	188,4	205,9	190,3
Kab. Mappi	173,3	183,8	221,1
Kab. Asmat	228,2	229,8	234,1
Kab. Waropen	62,5	81,6	76,8
Kab. Supiori	89,6	85,4	91
Kab. Mamberamo Raya	181,4	164,1	137

Kabupaten/kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Mamberamo Tengah	70,2	108,2	78
Kab. Yalimo	148,7	111,1	83,9
Kab. Lanny Jaya	117,9	120,5	93,3
Kab. Nduga	91,5	56,6	81,6
Kab. Dogiyai	94,4	97,9	105
Kab. Puncak	144,8	78,9	85,4
Kab. Intan Jaya	89,2	83,8	147,5
Kab. Deiyai	69,6	79,6	105,8

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu), 2023

Tabel di atas menunjukkan bagaimana perkembangan pengeluaran untuk kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2018-2021. Perkembangan pengeluaran pada fungsi kesehatan juga berfluktuasi. Pengeluaran untuk fungsi kesehatan tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Mimika sebesar 582 miliar rupiah. Sementara pengeluaran untuk fungsi kesehatan terkecil pada tahun 2021 ada di Kabupaten Waropen yaitu sebesar 76 miliar rupiah.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta adanya belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, namun beberapa tahun sebelumnya pernah mengalami penuruann. Kemudian, kembali mengalami kenaikan setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, dana desa yang diterima cukup besar dan selalu mengalami peningkatan serta pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan juga cukup besar. Sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana dana desa serta belanja daerah berdasarkan

fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh dana desa, belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, dan belanja daerah berdasarkan fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, dan belanja daerah berdasarkan fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu keuangan daerah di Provinsi Papua dan sebagai kajian atau informasi pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, & Ciptawaty, U. (2022). Hubungan antara belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1). <http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/adm/article/view/2>
- Arham, M. A., & Payu, B. R. (2019). Economics Development Analysis Journal Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia Article Info. *Economics Development Analysis Journal*, 8(4), 324–334. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ariwuni, M. A. D., & Kartika, I. N. (2019). Pengaruh Pdrb dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ipm dan Tingkat Kemiskinan di kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(12), 2927–3958.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Kelima). Yogyakarta. UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Azwardi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan serta Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1–11.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Bergvall, D., Charbit, C., Kraan, D.-J., & Merk, O. (2006). Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending. In *OECD Working Papers on Fiscal Federalism No. 3*. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.12.104>
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Damanhuri, D. S., & Findi, M. (2014). *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Cetakan 1). IPB Press.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public*

Administration and Governance Studies), 3(1).
<https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484>

- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia. *Economies*, 9(164), 1–12.
- Fadly, F., Inat, F., Iryanto, M., & Quilim, C. A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 123–129. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1858>
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(Education, Health, Housing, Public Facilities, Expenditure, Human Development Index), 1–11.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Fransman, T., & Yu, D. (2019). Multidimensional poverty in South Africa in 2001–16. *Development Southern Africa*, 36(1), 50–79. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1469971>
- Frisdiantara, C., & Mukhklis, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*. Deepublish.
- Fuad, N. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Girsang, W. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon. BPFE-UNPATTI.
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.19900.19.7.2018>
- Kawulur, S., Kolenangan, A. M., & C. Wauran, P. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19(No. 03), 107–117.

- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Kelima). UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Kundu, S., & Cabrera, M. (2022). *Fiscal Policies and their Impact on Income Distribution in India*. April. <https://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq120.pdf>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. . M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 12(1), 101–110.
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Nany, M., & Suryarini, T. (2022). Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java? *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5078>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS. In *Madenatera* (Vol. 1).
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance* (Eighth). McGraw-Hill International Edition.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 105–119.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (Fourth). W. W. Norton & Company, Inc. <https://doi.org/10.1080/02690949008726060>

- Sukirno, S. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Kedua). KENCANA.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di jawa timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6288>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Kesebelas). Penerbit Erlangga.
- Tri Wahyuni, R. N., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 128–144. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.441>
- Wahyudi, S. T. (2020). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-views* (Kedua). Rajawali Pers.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 156–166.
- Witta, S. R., Yulianita, A., Igamo, A. M., & Imelda. (2022). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Sumatera Barat. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 5(3), 195–209.
- Yanuar, A., Anwar, C., & Jokolelono, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah 2015 – 2019. *Katalogis*, 9(3), 283–295. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/18156>
- Yoserizal. (2015). Indeks Kemiskinan Manusia. In Zulkarnaini (Ed.), *Alafriau*. Pekanbaru. Alaf Riau.